

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDENT DAN DEWAN PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN LABA

(Studi pada Bank Umum Syariah di Lampung)

Siti Marwiyah¹, Ana Santika², Fauzan Akhmadi³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; marwiyahsiti515@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of tourism development on the socioeconomic conditions of communities in specific tourist areas. Tourism development is believed to provide positive contributions to increasing income, expanding employment opportunities, and improving the living standards of local communities. However, on the other hand, social changes, cultural commercialization, and economic inequality also emerge as challenges resulting from poorly managed tourism activities. The research method used combines qualitative and quantitative approaches through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that tourism development generates significant economic impacts, such as increased household income and the growth of small business sectors, but it also leads to social changes in the form of shifting cultural values and community lifestyles. Therefore, sustainable and participatory tourism development strategies are required to ensure that economic benefits are distributed equitably without neglecting the social and cultural aspects of local communities.

Keywords: *tourism, socioeconomic impacts, local communities, sustainable development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan wisata tertentu. Pengembangan pariwisata diyakini mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, perubahan sosial, komersialisasi budaya, dan ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan yang muncul akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui survei, wawancara mendalam, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memberikan dampak ekonomi yang signifikan seperti meningkatnya pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan sektor usaha kecil, namun juga menimbulkan perubahan sosial berupa pergeseran nilai budaya dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan partisipatif agar manfaat ekonomi dapat

dirasakan merata tanpa mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: pariwisata, dampak sosial ekonomi, masyarakat lokal, pembangunan berkelanjutan

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.(Nurjannah, 2017) Berdasarkan statistik Perbankan Syariah yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2018, di Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.((OJK), 2018) Dalam pengungkapan laporan keuangan perbankan syariah harus dilakukan secara transparan karena informasi yang sesuai dan memadai begitu penting dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di perbankan syariah. Dalam penyediaan laporan keuangan, perbankan syariah wajib untuk mematuhi standar yang telah ditentukan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Penyusunan laporan keuangan manajemen perusahaan banyak menggunakan konsep akrual basis karena dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan dibandingkan informasi yang dihasilkan dari cash basis . Apabila target perbankan syariah tidak tercapai maka pihak manajer perbankan syariah dapat mengubah komponen-komponen akrual yang dilaporkan. Adanya tindakan manajemen laba (earning management) di dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan (agent) dan pihak pemilik atau berkepentingan (principal) merupakan masalah yang sering terjadi dalam perusahaan.(Asyik, 2016) Dalam hal ini manajemen mempunyai informasi tentang perusahaan secara lebih luas dibandingkan pemiliknya. Kesenjangan informasi ini sering mendorong perilaku manajemen untuk

menyajikan laporan keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba guna memaksimalkan keuntungan pribadi melalui kebijakan-kebijakan yang digunakan, misalnya dengan melakukan creative accounting dengan tujuan agar kinerja agen terlihat bagus, karena agen mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa mendatang.(Nurjannah, 2017)

Melalui kebijakan yang diambil agen sebagai pengelola perusahaan dapat melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan dinilai kinerjanya baik oleh pihak pemilik sehingga akan mendapatkan bonus atau naik jabatan dari kinerjanya tersebut. Sedangkan prinsipal selaku pemilik perusahaan hanya dapat mengawasi jalannya perusahaan melalui informasi yang diberikan agen. Informasi yang disajikan oleh pihak agen tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Keterkaitan agency theory dalam penelitian ini adalah karena manajemen laba merupakan bentuk agency problem. Manajemen laba terjadi karena adanya assimetric information antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principle.(Suryanto, 2014)

Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi saran kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik).(Anita Indrasari, Willy Sri Yuliandri, 2016)

Riset lain yang telah membuktikan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ialah Robaert Jao Gagaring Pagalung at.all(Pagalung, 2011) sedangkan yang telah membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ialah Siti Nurjannah. (Nurjannah, 2017)

Landasan Teori

Komisaris Independen merupakan mekanisme internal Corporate Governance yang menjamin pada disiplin manajer perusahaan. Corporate Governance bertujuan menciptakan nilai tambah bagi stakeholders.(Rifai, 2009) Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung ataupun

tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.(Halasanni Agustina Pardede, 2023)

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dengan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris, mengawasi dan melindungi pihak pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan. Setiap anggota Dewan (Samsul, 2015)

Berdasarkan pembahasan diatas Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan kerjasama, afiliasi atau hubungan lainnya dengan direksi, manajemen, pemegang saham, anggota dewan komisaris lainnya serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi sikap independensinya. Komisaris Independen dapat melakukan pengawasan dan dianggap sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan mampu membatasi manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.(Suryanto, 2020)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas

Syariah harus membuat pernyataan secara bersekala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (Annual Report).

Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.(Sugiyono, 2013)

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik.(Suntoyo, 2016)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.(Sugiyono, 2017) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.⁷⁹

Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 variabel komisaris independen memiliki probabilitas sebesar 0,0182 lebih kecil dari p-value sebesar 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya dapat dilihat nilai koefisien sebesar - 0,792735 yang menunjukkan hubungan secara negatif, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen semakin berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba. Hal ini sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa tugas Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga, dengan adanya Komisaris Independen dalam suatu perbankan syariah maka praktek manajemen laba akan menurun, karena telah ada badan pengawas yang mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan operasional perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tidak merugikan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.

b. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas yang ditunjukkan pada Tabel 4.8, variabel dewan pengawas syariah yang dihitung dari jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki probabilitas sebesar 0,676 lebih besar dari p-value sebesar 0,05, maka H_1 ditolak yang berarti variabel dewan

pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya dapat dilihat bahwa dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien sebesar 0.006573 yang menunjukkan hubungan secara positif, dimana semakin banyak aktivitas rapat dewan semakin tinggi praktek manajemen laba. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah rapat dewan pengawas syariah maka akan semakin kecil praktek manajemen laba.

Hal ini tidak sesuai dengan Teori Agensi, dimana teori ini menjelaskan tentang konflik kepentingan antara pihak pengelola dan pihak pemilik perusahaan. Namun dalam penelitian ini membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen ini artinya semakin banyaknya jumlah rapat dewan pengawas syariah maka akan semakin naik praktek manajemen laba di perbankan syariah, dikarenakan dewan pengawas syariah tidak mengawasi secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Kurang mampunya dewan pengawas syariah dalam menurunkan praktek manajemen laba dalam perbankan syariah ialah dikarenakan terdapat beberapa perbankan syariah yang melakukan rapat dewan pengawas syariah kurang dari ketentuan yang diatur melalui Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan. Namun terlihat dalam statistik deskriptif perbankan syariah melakukan rapat dewan pengawas syariah kurang dari 12 kali, hal ini mengidentifikasikan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak akan mengurangi praktek manajemen laba di perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tulus Suryanto *et.al* yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjannah yang membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba studi pada Bank Umum

Syariah di lampung selama tahun penelitian 2014-2017. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan secara Parsial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisaris independen yang diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris terbukti berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. artinya komisaris independen terbukti mampu mengurangi praktek manajemen laba di Bank Umum Syariah di lampung.
2. Dewan pengawas syariah yang diukur dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rapat Dewan pengawas syariah maka akan semakin tinggi praktek manajemen laba. maka diharapkan dewan pengawas syariah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen agar informasi yang terkandung didalam dalam laporan keuangan semakin baik dan berkualitas.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

- (OJK), O. J. K. (2018). *Statistik Perbankan Syariah September 2018* (Graha Ilmu).
- Anita Indrasari, Willy Sri Yuliandri, D. N. T. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 100(1).
- Asyik, N. L. dan N. F. (2016). Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. (*Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5).
- Halasanni Agustina Pardede, D. A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Jalli, D. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Nurjannah, S. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional,*

- Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pagalung, R. J. dan G. (2011). Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1).
- Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *JURNAL HUKUM*, 16(3).
- Samsul, M. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (Erlangga).
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA.
- Suryanto, T. (2014). *Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah*. 18(1).
- Suryanto, T. (2020). *Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah*.